

HIDUP DI PENGASINGAN: EKSIL INDONESIA DI BELANDA

LIVING IN EXILE: THE INDONESIAN POLITICAL VICTIMS IN THE NETHERLANDS

Amin Mudzakkir

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - LIPI
amin.mudzakkir@gmail.com

Abstract

This paper discusses the experience of Indonesian exiles in the Netherlands. Presented in a chronological order from their departure to foreign countries until the post-Suharto era. This paper shows a strong interaction between international and domestic political battles as the context of their origin. Organized based on interviews and observations of the Indonesian exiles in the Netherlands, in addition to related literature review, this paper points out the effort by the exiles to maintain their nationalist commitment by creating a counter narrative to Indonesian historiography that neglected them.

Keywords: 1965 tragedy, exile, citizenship, nationalism

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan pengalaman kaum eksil Indonesia di Belanda. Dipaparkan secara kronologis mulai dari keberangkatan mereka ke luar negeri hingga era pasca-Suharto. Tulisan ini memperlihatkan adanya interaksi yang kuat antara pertarungan politik internasional dan domestik sebagai konteks kelahiran mereka. Disusun berdasarkan wawancara dan observasi dengan para eksil Indonesia di Belanda, selain tinjauan pustaka yang terkait, tulisan ini pada bagian akhir melihat usaha yang dilakukan oleh para eksil dalam merawat komitmen nasionalisme mereka dengan menciptakan narasi tandingan terhadap wacana historiografi Indonesia yang meminggirkan keberadaan mereka.

Kata kunci: peristiwa 1965, eksil, kewarganegaraan, nasionalisme

Pendahuluan

Peristiwa 1965 adalah titik balik dalam sejarah Indonesia modern, tidak hanya dalam pengertian adanya pergantian rezim, tetapi juga terkait dengan adanya penghancuran secara sistematis terhadap kekuatan kiri, khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kalangan nasionalis pada umumnya. Implikasi peristiwa ini terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia setelahnya sangat luas dan awet. Para anggota PKI dan siapa saja yang dianggap terkait dengannya dibunuh, sebagian ditangkap dan dipenjarakan, lalu dibuang.¹

¹ Hingga saat ini tidak ada yang dapat memastikan berapa jumlah orang yang meninggal dalam peristiwa itu. Orang pada umumnya memperkirakan yang tewas mencapai ratusan ribu. Sedangkan sejumlah orang Indonesia yang dicap "PKI" oleh pemerintah dan terpaksa mendekam di penjara satu setengah juta orang. Rezim Soeharto sendiri memberikan bermacam angka statistik yang berbeda. Pada 1981, pejabat rejim Soeharto mengatakan bahwa ada 1,5 juta eks-tapol. Empat tahun kemudian, para pejabat mengatakan jumlah

Beberapa tokohnya diajukan ke pengadilan yang telah direkayasa, sebelum dihukum mati di hadapan juru tembak tentara. Berbagai kajian (misalnya, Cribb, 1990; Budiawan, 2004; Heryanto, 2006; Roosa, 2008) telah melaporkan rangkaian peristiwa itu dengan baik, termasuk juga berbagai biografi dan autobiografi yang ditulis terkait dengan peristiwa ini (misalnya, Reid, 2001; Moentahal, 2002)

Akan tetapi, dari sekian kajian tentang peristiwa 1965, satu hal yang mencolok adalah absennya perhatian kepada dampak peristiwa tersebut terhadap dunia, termasuk orang Indonesia yang ketika itu sedang berada di luar negeri. Literatur tentang peristiwa 1965 umumnya memusatkan perhatian pada kondisi di

mereka sesungguhnya 1,7 juta. Try Soetrisno, dalam sebuah majalah, mengatakan bahwa jumlah mereka 1,8 juta. Mungkin saja jumlah mereka lebih besar dari itu. Lihat, John Roosa, Ayu Ratih & Hilmar Farid (ed), *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65* (Jakarta: Elsam, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, dan Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2004), hlm. 9.

dalam negeri. Meskipun pengaruh internasional selalu ditampilkan sebagai faktor yang ikut terlibat dalam peristiwa tersebut, dampak dari peristiwa itu terhadap orang-orang Indonesia di luar negeri jarang dibahas. Peristiwa atau kejadian di luar Indonesia selalu dilihat sebagai penyebab, bukan sebaliknya. Kenyataan akademis ini adalah contoh dari kajian Indonesia yang secara umum berorientasi domestik. Secara umum orang Indonesia di luar negeri adalah subjek penelitian sosial yang terabaikan.

Tulisan ini akan memperlihatkan bahwa peristiwa 1965 mempunyai dampak serius bagi orang Indonesia yang pada saat itu sedang berada di luar negeri. Dalam kenyataannya, penghancuran terhadap kekuatan kiri dan nasionalis yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, yang kemudian membangun pemerintahan Orde Baru, dilakukan juga di luar negeri. Mereka yang dinilai terkait dengan PKI atau memperlihatkan diri anti-Orde Baru dicabut paspornya, sehingga hak mereka sebagai warga negara Indonesia secara otomatis hilang. Akibatnya, mereka tidak bisa pulang, terpisah dari keluarga dan teman-teman, dan hidup di pengasingan. Sampai sekarang jumlah mereka belum diketahui secara persis, tetapi diperkirakan mencapai ribuan orang.² Ketika peristiwa 1965 terjadi, mereka sedang berada di negara-negara blok komunis dengan beragam alasan. Dalam perkembangannya, terutama sejak komunisme runtuh pada akhir 1980-an, sebagian besar mereka pindah ke negara-negara Eropa Barat, termasuk ke Belanda, untuk mencari hidup yang lebih baik. Di sana mereka memulai kehidupan baru sebagai imigran hingga menjadi warga negara.

Sistematika tulisan ini disusun sebagai berikut. Pertama adalah diskusi tentang konteks internasional dari peristiwa 1965 dan posisi Indonesia pada masa itu. Setelah itu dibahas praktik pencabutan paspor hingga strategi hidup mereka di Belanda. Bagian akhir tulisan ini mengulas suara-suara kaum eksil dalam melawan situasi yang mengasingkan mereka dan

²Arie Junaedi, seorang peneliti yang menulis disertasi tentang eksil 1965 di Universitas Padjadjaran, Bandung, menyebutkan jumlah mereka sekitar 1500 orang diunduh dari <http://news.detik.com/bandung/read/2010/08/03/161356/1412852/486/sekitar-1500-eksil-tragedi-1965-tak-bisa-pulang-ke-indonesia>.

tanggapan mereka terhadap beberapa isu penting pasca-Orde Baru, seperti rekonsiliasi. Secara teoritis keseluruhan tulisan ini ingin memperlihatkan hubungan kompleks antara politik dan personal yang tampak dalam kehidupan kaum eksil di pengasingan. Identitas mereka berayun di antara sentimen nasionalisme yang terpisah oleh waktu dan tempat pada satu sisi dan ikatan kewarganegaraan pada sisi yang lain.

Lingkungan Internasional

Kementerian luar negeri Indonesia yang dibentuk pada 19 Agustus 1945, dua hari setelah kemerdekaan, pada awalnya hanya beranggotakan seorang menteri, yaitu Ahmad Subarjo, dan tiga orang relawan yang tidak terlatih sama sekali dalam kerja-kerja diplomatik. Akan tetapi dengan cepat kementerian luar negeri ini berkembang untuk mengurus kedaulatan Indonesia yang masih digoyang oleh Belanda. Sementara di dalam negeri terjadi kekacauan dan perseteruan bersenjata, para diplomat menggalang dukungan dari negara-negara lain agar mengakui keberadaan Indonesia sebagai negara baru. Cina dan beberapa negara Arab adalah pihak yang pertama kali mengakui keberadaan Indonesia yang kemudian dikuatkan oleh dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selama periode awal ini, peran Syahrir sebagai perdana menteri juga sangat penting dalam menentukan arah diplomasi Indonesia. Dengan visi kosmopolitan yang cenderung pro-Barat, Syahrir berusaha membangun dasar kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana tercermin dalam pidatonya pada Konferensi Hubungan Asia di New Delhi pada April 1947 yang dihadiri oleh 200 peserta dari 32 negara-negara Asia.

Politik luar negeri Indonesia menemukan pijakan yang lebih kokoh pada pidato Mohamad Hatta sebagai wakil presiden pada 2 September 1948. Hatta menyampaikan pandangannya tentang keharusan Indonesia untuk 'mendayung di antara dua karang', yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menjadi pusat hegemoni politik internasional setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pidato Hatta ini kemudian menjadi pedoman bagi Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan tugas diplomatiknya.

Akan tetapi, terutama sejak tahun 1950-an, posisi Indonesia dalam lingkungan internasional sangat tergantung pada peran yang

dimainkan oleh Soekarno. Selama 1950-an, dengan visi dan kemampuan retorikanya yang luar biasa, Soekarno berusaha menempatkan Indonesia dalam posisi non-blok. Dengan menggandeng beberapa pemimpin Asia Afrika terkemuka, dia menggelorakan pentingnya persatuan negara-negara Asia Afrika yang umumnya baru lepas dari penjajahan. Usaha ini dikuatkan dengan keberhasilan Soekarno mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang dihadiri oleh 36 dari 60 negara yang diundang. Dalam pandangannya, dunia terbagi atas 'new emerging forces' (NEFOS) dan 'old established forces' (OLDEFOS).

Meski demikian, Soekarno tetap menjaga posisi Indonesia dalam sebuah hubungan yang kompleks antara blok Barat dan Timur. Sementara dianggap semakin anti-Barat, pada 1956 dia justru diundang ke Amerika Serikat untuk memberikan ceramah di hadapan anggota Kongres. Sejak 1957 Ford Foundation memberikan beasiswa kepada para ekonom muda Indonesia untuk melanjutkan studi di Amerika Serikat, khususnya di Universitas of California, Berkeley, yang kemudian belakangan para alumninya dikenal sebagai mafia Berkeley yang berpengaruh pada masa Orde Baru Soeharto. Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat selama periode tersebut diliputi kecurigaan terhadap keterlibatan AS dalam beberapa pemberontakan daerah di Indonesia.

Di sisi lain, hubungan Indonesia dan negara-negara blok Timur tetap terjaga baik. Kerjasama Indonesia dan Rusia, misalnya, semakin diperkuat setelah kunjungan Soekarno ke Moskow pada 1956. Sejak itu sejumlah mahasiswa Indonesia dikirim ke sana untuk melanjutkan studi. Jumlah mahasiswa Indonesia di Rusia bertambah drastis setelah Krushev menawarkan sejumlah beasiswa pada 1960 dalam kunjungannya ke Indonesia. Sampai 1965, jumlah mahasiswa Indonesia di Rusia mencapai 2000 orang. Hubungan Indonesia dan Cina meningkat terutama melalui jalur partai komunis antar kedua negara. Sejumlah tokoh PKI diundang ke Cina untuk mengajar bahasa dan studi Indonesia. Di antara mereka yang paling terkenal adalah Sobron Aidit, adik pemimpin PKI DN Aidit.

Dapat dikatakan bahwa sebagian besar orang Indonesia yang tinggal di luar negeri pra-1965 adalah mahasiswa. Sebagian besar mereka

bersekolah di Rusia³ atau Cina, sementara jumlah yang lebih kecil terdapat di Albania, Hungaria, Rumania, Cekoslovakia, Vietnam, Korea Utara, dan Mesir. Di luar itu, terdapat rombongan delegasi Indonesia ke Cina yang dikirim pada 1965. Jumlah mereka kurang lebih 500 orang. Selain itu, jumlah yang lebih kecil adalah para wakil Indonesia di berbagai organisasi regional dan internasional, seperti Asosiasi Jurnalis Asia-Afrika yang berkedudukan di Kolombo, Srilangka dan Solidaritas Asia-Afrika yang berkedudukan di Kairo, Mesir (Hill & Dragojlovic, 2010).

Tidak Bisa Pulang: Pencabutan Paspor

Bagian terburuk dari kisah kaum eksil adalah pencabutan paspor. Segera setelah terjadinya peristiwa 1965, pihak kedutaan besar yang dibantu oleh tim khusus menyaring warga negara Indonesia di luar negeri. Mereka yang terkait atau dituduh terlibat dengan PKI dicabut paspornya secara sewenang-wenang. Hak mereka sebagai warga negara dihilangkan sepenuhnya, sehingga mereka terhalang pulang ke tanah airnya. Tanpa identitas kewarganegaraan, mereka praktis kehilangan seluruh hak asasinya. Hannah Arendt, seorang filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyebutkan bahwa hak untuk mendapatkan hak (*the right to have rights*) adalah hak asasi paling mendasar. Pengertian hak untuk mendapatkan hak adalah hak seseorang untuk menjadi bagian dari keanggotaan politik tertentu, yaitu kewarganegaraan (dalam Benhabib, 2004)

Di mata pemerintahan Orde Baru Soeharto, orang Indonesia di luar negeri yang menolak kepemimpinannya dicap sebagai PKI. Dengan ini status hukum dan stigma moral yang tercela dialamatkan kepada mereka secara mudah. Memang jika dibandingkan dengan mereka yang dicap PKI di dalam negeri, nasib kaum eksil ini dianggap relatif lebih baik karena tidak langsung dibunuh atau dibuang, tetapi pengalaman traumatis yang disebabkan oleh pencabutan paspor tidak kalah tragisnya. Dipisahkan secara paksa baik secara geografis maupun temporal dengan keluarga, sahabat, dan tanah kelahiran adalah suatu penyiksaan psikologis yang mewariskan trauma mendalam.

³ Diunduh dari <http://www.thejakartapost.com/news/2010/07/02/ri-tries-win-hearts-its-exiles-russia.html>.

Ketika peristiwa 1965 meletus, orang Indonesia di luar negeri umumnya tidak mengetahui persis apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka mendengar memanasnya kondisi politik di tanah air, tetapi peristiwa tersebut tetap menjadi misteri bahkan hingga beberapa tahun setelahnya. Zaman itu jalur komunikasi paling cepat adalah melalui berita radio, namun kantor berita internasional seperti BBC (*British Broadcasting Corporation*) yang melaporkan kondisi di Indonesia dan khususnya lagi Jakarta beberapa hari setelah kudeta 30 September 1965 belum menyimpulkan secara persis apa yang sesungguhnya terjadi. Memang berita tentang pembunuhan beberapa jenderal angkatan darat dan rangkaian pembunuhan massal terhadap para anggota dan simpatisan PKI terdengar hingga Eropa, tetapi motif di balik peristiwa itu dan ke mana peristiwa tersebut berkembang tetap samar-samar.

Sebagian narasumber penelitian ini pada 1965 adalah para mahasiswa yang sedang belajar di negara-negara komunis, sementara sebagian lagi adalah utusan atau anggota delegasi Indonesia di luar negeri. Narasumber pertama adalah Djoemaeni Kartaprawira (wawancara, 12 Mei 2013, di Den Haag). Pada 1965 dia adalah mahasiswa Universitas Persahabatan di Moskow, Rusia, yang sedang menempuh studi di bidang hukum internasional. Dilahirkan di Solo, Jawa Tengah, pada 1938, dia berangkat ke Moskow pada 1963. Sebelum berangkat ke Rusia dia telah bekerja sebagai guru sekolah menengah di Semarang. Pada saat itu dia merasa sudah mapan dengan posisinya, lagi pula ketika itu dia sedang bersiap-siap melanjutkan studi ke Universitas Diponegoro. Oleh karena itu, ketika menerima kabar tentang tugas belajar ke Rusia, dia sempat ragu sebelum akhirnya memutuskan untuk berangkat. Pertimbangannya adalah dengan belajar ke Rusia dia berharap bisa merealisasikan impian mudanya melihat dunia. Selain itu, kekaguman terhadap Soekarno dan ide-ide nasionalismenya membangkitkan minatnya untuk melanjutkan sekolah lebih lanjut. Ketika itu Soekarno dalam suasana demokrasi terpimpin mendorong para mahasiswa untuk mempelajari 'sosialisme Indonesia' di negara-negara sosialis-komunis.

Djoemaeni tidak mengetahui apa yang sedang bergolak di tanah airnya pada bulan-bulan terakhir 1965. Dia memang mendengar berita dari radio yang mengabarkan adanya usaha kudeta terhadap Soekarno, akan tetapi

siapa yang melakukan kudeta dan untuk kepentingan apa sama sekali tidak jelas. Segera setelah merebaknya kabar kudeta itu pihak kedutaan besar Indonesia di Moskow mulai melakukan pendataan ulang dan penyaringan siapa saja warga negara Indonesia di sana. Di kalangan mahasiswa Indonesia sendiri muncul perpecahan. Sebagian yang menamakan dirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia di Uni Soviet (KAMUS)—mengikuti nama kelompok dan aksi-aksi serupa di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia—menuntut Soekarno mundur dari jabatannya. Pandangan dan sikap mereka jelas anti-PKI dan menganggap partai tersebut berada di balik Gerakan 30 September dan secara umum bertanggung jawab atas situasi Indonesia yang semakin memburuk.

Meskipun tidak mengetahui persis apa yang sedang berlangsung di Indonesia, Djoemaeni menolak pandangan para aktivis KAMUS. Keberatan utamanya adalah soal Soekarno. Baginya, menganggap bahwa Soekarno sebagai akar masalah peristiwa 1965 adalah tidak logis, sebab bagaimana mungkin Soekarno mengkudeta dirinya sendiri. Bersama teman-teman Soekarno, Djoemaeni terlibat perseteruan dengan para aktivis KAMUS yang salah satunya adalah teman seasmaranya sendiri. Persoalannya bagi Djoemaeni kemudian bukan hanya figur Soekarno semata, tetapi yang terpenting adalah soal kebenaran peristiwanya sendiri. Dia tidak mau mengikuti pandangan yang menurutnya ketika itu sudah jelas keliru baik secara faktual maupun moral.

Oleh karena sikapnya yang tegas berada pada garis nasionalisme Soekarno, Djoemaeni terhalang pulang ke tanah airnya. Paspornya dicabut. Statusnya dengan demikian adalah orang tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Berbulan-bulan dia mengalami depresi berat hingga akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan studi hingga tingkat doktoral. Beruntung pemerintah Rusia bersedia memberi bantuan beasiswa untuknya. Djoemaeni menyelesaikan program doktor pada 1973. Dia menikah dengan seorang perempuan Rusia. Dari pernikahannya lahir satu anak perempuan. Sementara itu, dengan gelar doktor yang disandanginya, Djoemaeni awalnya berniat untuk bekerja sebagai advokat, tetapi di negara sosialis-komunis seperti Uni Soviet profesi itu ternyata tidak mencukupi kebutuhan ekonominya. Kemudian dia melamar menjadi peneliti di lembaga negara untuk hukum

forensik. Dia bekerja di tempat itu hingga tahun 1989 ketika akhirnya memutuskan untuk pindah ke Belanda.

Hidup di Rusia pada zaman pemerintahan komunis relatif terjamin. Djoemaeni bisa bergaul secara bebas dengan penduduk setempat termasuk dengan teman-temannya di tempat kerja. Meskipun tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi warga negara Rusia, karirnya cukup lancar. Secara legal statusnya selama tinggal di Rusia adalah orang asing. Dia mempertahankan statusnya sebagai warga negara Indonesia meskipun secara legal tidak berlaku lagi. Dia tetap membayangkan suatu ketika bisa pulang ke Indonesia dan berkumpul kembali bersama keluarga serta sahabat-sahabatnya. Bayangan tersebut terus hidup bersama keyakinan bahwa pada akhirnya rezim Orde Baru akan tumbang.

Akan tetapi kejatuhan komunisme pada 1989 membuat semuanya berubah. Sejak itu kondisi politik dan ekonomi di Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya menjadi tidak stabil. Sentimen negatif dan bahkan aksi kekerasan terhadap orang asing meningkat tajam. Dia menyaksikan beberapa orang asing dipersekusi di jalanan. Sejak itu hidup di Rusia terasa tidak aman lagi baginya. Setelah mempertimbangkan segala hal, dia memutuskan untuk meminta suaka politik ke Belanda, meski istri dan anaknya tetap tinggal di Moskow hingga sekarang.

Narasumber selanjutnya adalah Sardjio Mintardjo (wawancara, 10 Mei 2013, di Leiden). Pada 1965, dia adalah mahasiswa ekonomi politik di Academia de Studii Economice din Bucuresti. Sebelum dikirim oleh pemerintahan Soekarno pada 1962, Mintardjo aktif dalam organisasi Indonesia Muda dan mempunyai minat tinggi dalam bidang olahraga. Oleh karena itu, ketika berangkat dari Jakarta, tujuan Mintardjo bukan untuk sekolah, tetapi untuk menghadiri festival pemuda sedunia di Helsinki, Finlandia. Selain wakil organisasi pemuda seperti dirinya, rombongan Indonesia dalam festival itu diwakili juga oleh aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII), Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Consentration Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang berafiliasi dengan PKI. Dalam festival itu diselenggarakan berbagai kegiatan, termasuk pertandingan olahraga. Mintardjo ikut dalam tim sepakbola. Setelah acara festival

selesai, secara tiba-tiba Mintardjo dikontak oleh dua pihak. Pertama adalah Pemuda Rumania yang berafiliasi dengan Partai Komunis Rumania yang mengundangnya untuk menghadiri hari kemerdekaan Rumania. Kedua adalah Duta Besar Indonesia untuk Rumania, Sukrisno, yang menawarkan kesempatan studi di Rumania.⁴ Mintardjo tidak punya pilihan lain kecuali menerima dua permintaan itu.

Tidak lama setelah peristiwa 30 September 1965, Mintardjo diminta oleh pihak perwakilan Indonesia di Bukares untuk menandatangani pernyataan bahwa dirinya mendukung kepemimpinan Jenderal Soeharto dan menyetujui bahwa Sukarno terlibat dalam peristiwa tersebut. Mintardjo menolak dua hal tersebut karena dia merasa tidak mengetahui sama sekali apa yang terjadi di Indonesia. Buah dari sikapnya tersebut adalah pencabutan paspor. Dia ditolak untuk pulang ke Indonesia. Hubungan dengan keluarga dan sahabat di Indonesia menjadi sangat sulit atau bahkan terputus sama sekali. Mintardjo tentu sangat terpuak dengan kenyataan ini.

Akan tetapi bagaimanapun hidup harus terus berjalan. Menikah dengan seorang perempuan Rumania bernama Liliana, Mintardjo mempunyai tiga orang anak, yaitu Heru, Ratnawati, dan Nurkasih. Dengan gelar diploma yang disandangnya, Mintardjo memperoleh pekerjaan di sebuah biro pemerintah Rumania di Bukares hingga 1989. Sama seperti Djoemaeni, Mintardjo memutuskan pindah ke Belanda beberapa saat setelah Presiden Nicolae Ceaușescu terbunuh dalam revolusi yang menjatuhkan rezim komunis Rumania. Setelah revolusi itu kondisi Rumania memburuk, sehingga sebagai orang asing Mintardjo merasa tidak aman lagi tinggal di sana.

Narasumber berikutnya adalah Ibrahim Isa (Wawancara, 15 Mei 2013, di Amsterdam). Dia adalah wakil Indonesia untuk organisasi kesetiakawanan rakyat Asia Afrika di Kairo, Mesir, sejak 1960. Pada bulan September 1965 dia sedang menghadiri sebuah konferensi tri-kontinental di Havana, Kuba. Dalam konferensi tersebut ternyata ada delegasi Indonesia lainnya yang dikirim langsung dari Jakarta dipimpin oleh Jenderal Latief Hendraningrat. Isa secara tegas menolak kehadiran delegasi tersebut dan

⁴ <http://www.thejakartapost.com/news/2010/03/30/mintardjo-indonesian-heart.html>

meyakinkan panitia konferensi bahwa mereka adalah kelompok kontra-revolusioner yang justru hendak menghambat perjuangan rakyat Asia-Afrika. Akhirnya panitia memutuskan bahwa delegasi yang dipimpin oleh Isa adalah delegasi yang sah.

Namun di tengah acara konferensi tersebut, Isa mendengar kabar nasib keluarganya di Kairo berada dalam ancaman. Sesaat kemudian dia mendapat informasi yang masih sepotong-sepotong mengenai adanya kudeta di Jakarta. Meski secara umum informasinya belum jelas, dia memperoleh kabar bahwa Presiden Sukarno berada dalam bahaya. Dengan bantuan kawan-kawannya di Mesir dan beberapa negara lain, Isa segera mengeluarkan istrinya ke Srilangka lalu ke Cina, padahal ketika itu istrinya sedang hamil tua. Isa sempat pulang ke Jakarta sebentar, tetapi segera pergi meninggalkan tanah kelahirannya setelah diberi tahu pokok permasalahannya oleh saudaranya yang bekerja sebagai perwira angkatan udara.

Isa bertemu kembali istrinya di Cina. Sejak itu dia menyadari bahwa paspor Indonesianya sudah dicabut oleh pemerintah Indonesia di Jakarta. Di sana mulanya dia hidup di dalam kamp bersama rombongan delegasi Indonesia yang dikirim oleh Sukarno tetapi, sama seperti dirinya, terhalang pulang. Namun belakangan dia dan istrinya membina kehidupan pribadi sendiri di Beijing, sementara rekan-rekannya dipindahkan ke Nanjing. Di kota ini keempat anak perempuannya lahir dan tumbuh hingga usia remaja. Isa sendiri tetap aktif menulis dan menggalang komunikasi dengan para koleganya di seluruh dunia.

Akan tetapi, rencana pembukaan kembali hubungan diplomatik Indonesia-Cina membuat keadaan berubah. Ternyata rencana tersebut memuat prasyarat, salah satunya adalah permintaan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Cina agar mereka mendata para eksil yang tinggal di sana. Ini tentu saja menimbulkan keresahan di antara eksil, termasuk Ibrahim Isa. Meskipun tidak jelas untuk apa pendataan itu dilakukan, sebagian eksil merasa resah. Pada saat yang sama, banyak eksil yang mulai berpikir untuk mencari kehidupan lebih baik, khususnya bagi masa depan anak-anaknya. Dengan latar belakang seperti itu, Isa akhirnya bermigrasi ke Belanda pada 1987.

Narasumber selanjutnya adalah Sulardjo (Wawancara, 15 Mei 2013, di Amsterdam). Pada

1965 Sulardjo adalah salah satu anggota delegasi Indonesia yang ditugaskan oleh Presiden Sukarno untuk menghadiri ulang tahun Republik Rakyat Tiongkok bersama kurang lebih 500 orang lainnya. Dia adalah ketua Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) wilayah Sumatera Utara dan masih tercatat sebagai mahasiswa kedokteran di Universitas Sumatera Utara, Medan. Dia sejatinya menggantikan temannya, ketua pengurus pusat CGMI yang sedang berhalangan mengikuti kunjungan ke Cina tersebut. Ketika berangkat dia meninggalkan seorang istri yang belum lama dinikahinya.

Peristiwa 1965 mengubah hidupnya. Semua anggota delegasi yang dikirim ke Cina dituduh sebagai anggota PKI dan oleh karena itu pihak militer yang berkuasa di Jakarta mencabut paspornya. Beberapa orang mencoba pulang ke Jakarta, tetapi tidak lama kemudian ditangkap oleh tentara yang rupanya telah mengintainya. Menghadapi situasi yang sama sekali berada di luar perkiraannya tersebut, Sulardjo tidak mempunyai pilihan lain kecuali tinggal di Cina. Awalnya dia berpikir bahwa itu hanya sementara. Akan tetapi pikiran tersebut tidak pernah terbukti. Pemerintah Cina justru merelokasi anggota delegasi yang berjumlah ratusan tersebut ke sebuah kamp di kota Nanjing. Sulardjo berhasil mengontak istrinya mengabarkan situasi yang dihadapinya melalui pihak ketiga.

Situasi yang menjenuhkan dan frustrasi karena kontrol pemerintah Cina yang sangat ketat mendorong Sulardjo untuk bermigrasi ke Eropa Barat. Dia naik pesawat terbang menuju Frankfurt, lalu dari sana melanjutkan perjalanan melalui jalan darat ke Belanda. Ketika itu kontrol imigrasi Belanda belum terlalu ketat, sehingga dia relatif tidak mempunyai kendala berarti ketika masuk ke Belanda. Dia bertemu kembali dengan isterinya di Belanda setelah terpisah kurang lebih 11 tahun lamanya.

Narasumber selanjutnya adalah Chalik Hamid (Wawancara, 15 Mei 2013, di Amsterdam). Dia dikirim dari Jakarta pada awal 1965 untuk belajar jurnalistik di Universitas Tirana, Albania. Ketika itu dia meninggalkan istrinya, Sri Sutiati, yang sedang hamil tujuh bulan. Anaknya, Chasrita, lahir pada 19 Maret 1965. Akan tetapi peristiwa 1965 membuat dia tidak bisa bertemu dengan Sri Sutiati dan anaknya hingga 1995. Istrinya ditangkap tanpa

peradilan pada 1967 dan baru dibebaskan pada 1979. Setelah bebas dari penjara istrinya menemui ibunya untuk meminta izin menikah dengan temannya, Astaman. Chalik merestui pernikahan istrinya dan temannya tersebut karena kondisi membuatnya tidak mungkin lagi untuk bersatu dan juga demi masa depan anak perempuannya. Chalik sendiri menikah dengan seorang perempuan Albania dan mempunyai dua orang anak.

Sebelum berangkat ke Albania, Chalik Hamid adalah ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) cabang Medan. Bersama rekan-rekannya dia aktif mengorganisasikan pementasan teater, drama, dan pembacaan puisi. Dia juga memenangkan beberapa penghargaan sastra. Karya-karyanya dimuat baik di media lokal maupun nasional. Secara politik dia jelas adalah seorang Sukarno. Oleh karena itu, ketika terjadi Gerakan 30 September di Jakarta, dia teguh berdiri di atas garis Sukarno. Akibatnya paspornya dicabut. Dia tidak bisa pulang ke Indonesia. Sama seperti eksil lainnya, awalnya dia berpikir bahwa itu akan berlangsung sebentar. Akan tetapi, hingga 1969 ketika menyelesaikan studinya, dia semakin menyadari harapannya untuk pulang ke Indonesia semakin pudar.

Di tempat pengasingan, Chalik Hamid tetap aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Indonesia. Dia bekerja sebagai penerjemah dan pembawa berita seksi Indonesia di Radio Tirana yang konon bisa didengar hingga di tanah kelahirannya di Medan. Bersama rekan-rekan sesama eksil dia juga menerbitkan majalah berbahasa Inggris, *Api Pemuda Indonesia (API)*. Melalui majalah ini Chalik dan teman-temannya merawat ingatannya tentang Indonesia dan menumpahkan kritiknya terhadap rezim Orde Baru yang menyingkirkan mereka. Akan tetapi, seperti rekan-rekan eksil lainnya, runtuhnya komunisme membuat arah hidup mereka berubah. Setelah merasa tidak aman lagi tinggal di Albania, Chalik Hamid dan keluarganya pindah ke Belanda.

Narasumber terakhir studi ini adalah Sarmadji Sutiyo (Wawancara, 19 Mei 2013, di Amsterdam). Teman-teman dekatnya memanggilnya Warjo yang menurutnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu *'waras'* (sehat) dan *'bejo'* (beruntung). Nama ini lahir di tengah perasaan traumatis karena kehilangan hubungan dengan tanah kelahiran dan kemarahan terhadap Orde

Baru, dia merasa bersyukur karena masih diberi kesehatan dan keberuntungan. Sebelum berangkat ke Cina pada 1964, Sarmadji adalah aktifis Pemuda Rakyat, salah satu organ PKI. Dia juga tercatat sebagai pegawai departemen pendidikan di Jakarta. Sejak awal dia sangat tertarik dengan dunia anak, khususnya pendidikan anak. Oleh karena itu, ketika sekolah di Beijing dia mengambil bidang pendidikan anak. Dia berpikir spesialisasinya itu bisa dikembangkan ketika kelak pulang ke Indonesia.

Harapan Warjo tidak pernah terwujud. Peristiwa 1965 menggagalkan rencananya. Bersama dengan rombongan delegasi Indonesia yang dikirim ke Cina pada 1965 dia terhalang pulang. Dia berhasil menyelesaikan sekolahnya, tetapi lalu bingung mau melakukan apa. Pemerintah Cina pasca-Revolusi Kebudayaan memang memberikan fasilitas untuk kaum eksil karena mereka dianggap tamu negara, tetapi mobilitas mereka sangat terbatas. Dalam situasi ini Warjo merasa tidak bisa mengembangkan diri sama sekali. Oleh karena itu, sejak pertengahan tahun 1970-an dia bermigrasi ke Belanda.

Enam eksil di atas mempunyai cerita sendiri-sendiri, tetapi disatukan oleh sebuah narasi, yaitu nasionalisme. Lepas dari latar belakang ideologi sebelum mereka meninggalkan Indonesia, dalam perkembangannya mereka memeluk teguh perasaan menjadi bangsa Indonesia. Faktor Soekarno memang sangat sentral, tetapi juga pengalaman mereka sebagai eksil membuat sentimen kebangsaan menjadi mengental. Dalam latar belakang dunia yang berubah, mereka akhirnya bermigrasi dari negara-negara sosialis-komunis yang mulai runtuh ke negara-negara liberal di Eropa Barat. Di tempat baru, keindonesiaan mereka kembali dihadapkan dengan tuntutan migrasi dan kewarganegaraan, selain dengan kebutuhan dasar hidup sehari-hari.

Mencari Kehidupan yang Lebih Baik: Pindah ke Belanda

Runtuhnya komunisme pada akhir 1980-an di Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya adalah titik balik dalam kehidupan kaum eksil. Sementara sering dinilai sebagai pembebasan dari rezim otoriter dan langkah menuju demokratisasi, runtuhnya komunisme bagi kaum eksil justru merupakan awal dari era kekhawatiran dan ketidakpastian. Bubarnya Uni

Soviet yang diikuti oleh jatuhnya rezim komunis di Eropa Tengah dan Timur menimbulkan berbagai problematik serius baik pada tataran kenegaraan maupun pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal yang sangat mencolok dan berpengaruh langsung terhadap keberadaan kaum eksil adalah munculnya sentimen anti orang asing yang kuat (Sevortian, 2009). Kekerasan terhadap orang asing kerap terjadi. Ini menimbulkan kekhawatiran karena kenyataannya kaum eksil secara legal tetaplah orang asing. Selain faktor keamanan, kekhawatiran juga berasal dari ketidakpastian masa depan pekerjaan dan posisi sosial ekonomi mereka.

Sementara itu, sejawat mereka, eksil Indonesia di Cina, bahkan sejak tahun 1970-an banyak yang telah memutuskan untuk keluar dari negara itu dan pindah ke berbagai negara Eropa Barat. Revolusi Kebudayaan yang dijalankan oleh pemimpin Mao membuat ruang gerak mereka di Cina menjadi sangat terbatas. Mereka, misalnya, harus lapor kepada otoritas pemerintah lokal setempat jika hendak bepergian ke luar kota. Semuanya serba dikontrol. Memang pemerintah setempat menyediakan berbagai fasilitas dan jaminan selama mereka bermukim di sana. Mereka ditempatkan di kota Nanjing. Di sana mereka diberi jatah kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk juga guru-guru dan bahan-bahan pelajaran khususnya tentang Marxisme dan bahasa serta budaya Cina. Akan tetapi, pemukiman mereka lebih berupa kamp yang terisolasi dari dunia luar. Kejenuhan dan frustrasi melanda mereka, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan di antara mereka. Memang beberapa orang berhasil bertahan di Cina hingga akhir 1980-an, namun hanya sedikit yang tersisa setelah itu.

Setelah jatuhnya komunisme, sebagian besar kaum eksil Indonesia di Rusia dan negara-negara eks-komunis lain memutuskan untuk bermigrasi ke negara-negara Eropa Barat dan Skandinavia. Perancis, Swedia, dan khususnya Belanda adalah negara tujuan utama mereka. Pilihan untuk bermigrasi ke Belanda menimbulkan perasaan ironis bagi sebagian mereka sendiri. Mereka mencari peruntungan di negara yang dulu pernah menjajah tanah airnya. Dalam hal ini hendaknya diingat bahwa ketika meninggalkan Indonesia pada tahun 1960-an, suasana anti-Belanda di Indonesia terutama terkait dengan isu Irian Barat masih sangat kuat termasuk di kalangan eksil. Dilema antara

sentimen kebangsaan dan kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik adalah kondisi psikologis yang membayangi pilihan mereka ketika bermigrasi ke Belanda. Di sisi lain migrasi ke Belanda, dibanding ke negara lain, adalah pilihan yang lebih menjanjikan masa depan mereka mengingat kondisi Belanda sendiri sebagai negara kesejahteraan yang stabil dan kuat pada masa itu (van Oorschot, 2006).

Para eksil masuk ke Belanda melalui jalur pencari suaka (Hill, 2008). Tentu saja tidak semua eksil bisa masuk dengan mudah ke Belanda melalui jalur ini, tergantung pada usaha para pengacara, kelompok aktivis hak asasi manusia, atau gereja yang membantu mengadvokasi proses pengajuan suaka mereka. Dalam hal ini peran Prof. Wertheim sangat penting. Profesor di Universitas Amsterdam ini adalah seorang ahli sosiologi Dunia Ketiga, khususnya Indonesia, yang gigih dalam membantu orang-orang kiri, termasuk kaum eksil, yang tersingkir oleh rezim Orde Baru. Dengan jaringannya yang luas, dia membantu advokasi kaum eksil agar bisa diterima di Belanda melalui jalur suaka politik. Argumen yang dikemukakanya adalah kaum eksil terhalang pulang ke Indonesia oleh karena suatu praktik politik tertentu, sehingga suaka atas dasar kemanusiaan adalah pilihan yang harus diambil oleh pemerintah Belanda (Wawancara dengan Siswa Santoso, 16 Mei 2013, Amsterdam).

Proses penerimaan terhadap permintaan suaka kaum eksil berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang selesai cepat dalam hitungan hari atau minggu, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun. Semuanya tergantung pada proses legal yang cukup ketat. Mereka yang telah menyiapkan berbagai dokumen lengkap untuk pencarian suaka akan lebih mudah daripada mereka yang hanya bermodal nekad. Selain itu, eksil yang mencari suaka ke Belanda pada tahun 1970-an jauh lebih cepat mendapatkan penerimaan daripada mereka yang datang ke sana lebih belakangan.

Selain persoalan legal, kaum eksil yang bermigrasi ke Belanda juga menghadapi persoalan psikologis yang pelik. Beberapa orang, seperti tergambar paling jelas pada Sarmadji, awalnya merasa hina dengan kenyataan bahwa mereka pada akhirnya menjadi warga negara Belanda. Dia menganggap bahwa

menjadi warga negara Belanda adalah menjadi 'kacung' dari negara yang dulu menjajah bangsanya. Terkadang dia merasa mengkhianati perjuangan para leluhurnya di tanah air yang rela berkorban untuk mengusir Belanda, tetapi ironisnya dia sekarang menjadi bagian darinya. Akan tetapi, Sarmadji pun menyadari bahwa keberadaannya di pengasingan bukan pilihannya, melainkan tersingkir oleh keputusan politik yang dibuat oleh sesama bangsanya. Perasaan campur aduk ini menimbulkan trauma tertentu, mewujud pada sikap marah dan dendam kepada rezim Orde Baru.

Akan tetapi, beberapa eksil yang lain berpendapat bahwa Belanda yang sekarang dalam banyak hal berbeda dengan Belanda yang dulu. Belanda yang sekarang adalah negara baru bagi mereka, tentu saja karena terpaksa, tetapi bagaimanapun mereka merasa mempunyai kewajiban menjadi warga negara yang baik. Ibrahim Isa berpendapat bahwa oleh karena dirinya adalah warga negara Belanda, maka dia pun harus mendapatkan hak dan melakukan kewajiban seperti warga negara lainnya. Apalagi mengingat usianya sekarang, menjadi warga negara Belanda tidak bisa lagi dimaknai sebagai tempat persinggahan, tetapi mungkin akan menjadi tempat terakhirnya sebelum dijemput kematian.

Pertimbangan keluarga adalah prioritas tertinggi dalam keputusan hidup yang diambil oleh para eksil, termasuk sejak mereka memutuskan pindah dan tinggal di Belanda. Bagaimanapun umumnya istri dan anak-anak mereka adalah orang Eropa. Generasi kedua eksil umumnya mempunyai pengetahuan yang sangat terbayas tentang Indonesia, negeri ayah mereka. Anak-anak Mintardjo, Chalik Hamid, dan Djoemaeni mengenal sedikit saja Indonesia. Bahkan anak-anak Ibrahim Isa yang ibunya adalah orang Indonesia pun sedikit sekali mempunyai kontak dengan Indonesia.

Persoalan lain yang menjadi kendala kehidupan kaum eksil Indonesia di Belanda adalah sulitnya mencari pekerjaan. Bagi eksil yang datang ke Belanda pada akhir 1980-an, faktor usia adalah masalah yang tidak mudah diatasi. Dengan usia rata-rata menjelang 50 tahun pada awal tahun 1990-an, mereka sulit mendapatkan lowongan kerja di perusahaan-perusahaan. Sertifikat dan gelar akademis tidak membantu mereka, bahkan lebih sering justru menyulitkan mereka. Lembaga-lembaga akademis

pun tidak bersedia menerima pegawai baru. Djoemaeni yang mempunyai gelar doktor dalam bidang hukum dan pernah bekerja di lembaga riset di Rusia, misalnya, kesulitan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan latar belakangnya. Akibatnya mereka bekerja apa saja untuk memenuhi syarat minimal kerja sosial untuk mendapatkan tunjangan kesejahteraan dari pemerintah. Djoemaeni akhirnya bekerja sebagai pemotong kaca.

Selama Orde Baru, hubungan antara eksil dan KBRI Den Haag beku sama sekali. Meskipun keberadaan eksil dipandang kurang politis lagi di mata KBRI, berbeda dengan orang RMS (Republik Maluku Selatan), mereka tetap dicurigai sebagai bagian dari komunisme di masa lalu. Kebekuan ini pecah pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Di bawah duta besar Abdul Irsan, KBRI Den Haag membuka pintunya lebar-lebar kepada kaum eksil. Akan tetapi, hubungan manis ini ternyata tidak berlangsung lama. Setelah berakhirnya pemerintahan Gus Dur dan kepemimpinan KBRI oleh Abdul Irsan, hubungan eksil-KBRI mendingin kembali. Pada periode kepemimpinan Fanny Habibie, hubungan di antara mereka malah memburuk. Di bawah kepemimpinan duta besar Retno Marsudi, muncul inisiatif KBRI untuk membuka kembali kebekuan tersebut dengan mengundang sejumlah eksil ke acara-acara KBRI. Akan tetapi, menurut penilaian sejumlah eksil inisiatif tersebut lebuhs bersifat personal daripada kelembangaan. Kaum eksil dilihat lebih sebagai individu-individu daripada kelompok yang mempunyai pengalaman dan visi politik tertentu.

Situasi dan Pandangan Pasca-Soeharto

Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 1998 membuka kesempatan munculnya wacana tanding peristiwa 1965. Jika pada masa Orde Baru narasi tentang tema itu dikuasai oleh versi sejarah resmi yang hanya menyuguhkan peristiwa pembunuhan para jenderal oleh Gerakan 30 September, segera setelah 1998 terbit berbagai karya yang melaporkan pembunuhan massal 1965-1966 dan berbagai implikasi yang terjadi setelahnya. Selain ditulis oleh para akademisi dan aktivis sosial, narasi baru tersebut ditulis juga langsung oleh para korban. Beberapa orang menulis memoar yang berusaha menjelaskan duduk perkara isu 1965 untuk mengklarifikasi stigma yang sudah terlanjur diterima oleh masyarakat, seperti

hubungan antara komunisme dan agama (Reid, 2001; Moestahal, 2002). Lebih lanjut narasi ini mencoba untuk memberi pandangan ilmiah bagi agenda rekonsiliasi yang diusulkan beberapa kelompok. Dikerangkai oleh argumen hak asasi manusia, narasi sejarah pasca-Soeharto tersebut mempunyai tujuan etis dan politis yang kuat, yaitu pengungkapan kebenaran dan keadilan sejarah yang terpinggirkan.

Hal yang menarik adalah narasi tandingan tersebut di antaranya muncul dan berkembang di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) tempat beberapa kelompok di dalamnya pada 1965-1966 terlibat dalam skenario pembunuhan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Pada tahun 2000, Sekelompok anak muda NU di Yogyakarta mendirikan Syarikat Indonesia. Mereka memulai usaha untuk mempertemukan berbagai elemen masyarakat yang tepecah, sehingga tidak berkomunikasi secara baik, pasca-Peristiwa 1965. Mereka juga menerbitkan buletin dan buku-buku yang membuka wawasan baru di sekitar isu tersebut. Inisiatif kelompok ini tidak lepas dari peran Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai pemimpin NU yang sejak lama aktif mempromosikan pentingnya rekonsiliasi dan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Pada masa kepresidenan B. J. Habibie, terdapat empat perubahan sikap pemerintah terhadap komunisme Pertama, pemerintah menghentikan pemutaran film 'Pengkhianatan G-3-S/PKI' yang sebelumnya selalu ditayangkan di seluruh stasiun televisi pada malam 30 September. Kedua, pembebasan 10 tahanan politik yang terkait peristiwa 1965. Ketiga, pemerintah tidak bereaksi atas pembentukan YPKP (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966). Keempat, pemerintah tidak lagi menggunakan retorika "bahaya laten komunisme" secara eksplisit dan massif. Meski demikian, pada saat yang sama Habibie juga mengeluarkan pernyataan yang terlihat kontradiktif dengan empat pencapaian di atas. Dua pernyataan tersebut adalah: pertama, pemerintah mengusulkan memasukkan sebuah ketentuan dalam KUHP bagi mereka yang diketahui menyebarkan ajaran Marxisme/Komunisme/ Leninisme. Kedua, Habibie sendiri sempat mengeluarkan pernyataan bahwa ada gerakan subversi yang dilakukan oleh "komas", yaitu singkatan dari "komunis, nasionalis, dan marhaenis" (Budiawan, 2004: 19-22).

Presiden Gus Dur mengambil langkah yang lebih progresif daripada para pendahulunya. Selama masa pemerintahannya, paling tidak ada empat kemajuan yang dicapai terkait isu komunisme dan peristiwa 1965. Pertama, pemerintah mengizinkan para eksil untuk kembali ke tanah air dan mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia jika mereka menghendakinya. Kedua, Gus Dur secara pribadi meminta maaf kepada korban pembunuhan massal 1965-1966. Ketiga, pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) dan program 'penelitian khusus' (litsus) terhadap para calon pegawai negeri sipil. Keempat, Gus Dur menganjurkan pencabutan TAP MPRS No. 25/1966 yang menyatakan PKI adalah partai terlarang dan Komunisme/Marxisme/Leninisme tidak boleh disebarkan (Budiawan, 2004: 22-23).

Meski demikian, berakhirnya kekuasaan Orde Baru tidak secara otomatis menghapus ingatan kolektif yang telah dibangunnya. Wacana anti-komunis masih hidup di tengah masyarakat dan bahkan terus menerus direproduksi. Oleh karena itu, tidak heran jika usulan Gus Dur untuk mencabut TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 mendapat tentangan keras dari berbagai kalangan. Komunisme tetap dipandang sebagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Akibatnya usulan Gus Dur ditolak oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Amin Rais, ketua MPR yang juga seorang tokoh Muhammadiyah, menilai pencabutan TAP tersebut tidak perlu. Pandangan ini diikuti oleh para pemimpin Islam yang lain, termasuk dari kalangan NU sendiri. KH Hasyim Muzadi, ketua umum PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) setelah Gus Dur, dan KH Yusuf Hasyim, pemimpin pesantren Tebuireng, Jawa Timur yang juga pamannya Gus Dur, menolak usulan tersebut. Bagi mereka, komunisme dan Islam adalah paham yang saling bertentangan (Suhelmi, 2006).

Sikap pribadi Gus Dur terhadap keberadaan kaum eksil sangat jelas. Dalam acara penyerahan Yap Thiam Hien Award di Jakarta pada 10 Desember 1999, Gus Dur mempersilahkan kaum eksil untuk kembali pulang ke Indonesia. Gus Dur mengatakan bahwa "Tidak ada kesulitan, bagi para pejuang yang masih di luar negeri untuk kembali ke tanah air tercinta ... Tetapi bagi para pejuang

yang sudah bernaturalisasi di sana, itu hak mereka untuk tidak kembali, tetapi kalau mau kembali ke tanah air, tidak dipersulit...” (Dikutip Isa, tt: 187). Gus Dur kemudian memerintahkan menteri hukum dan perundang-undangan, Yusril Ihza Mahendra, untuk berdialog dengan kaum eksil di Belanda. Pada tanggal 17 Januari 2000, kaum eksil yang tersebar di beberapa negara Eropa berkumpul di KBRI Den Haag, Belanda. Dalam acara tersebut Yusril menyampaikan pandangan pemerintah yang membuka pintu bagi para eksil untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Akan tetapi, sebagian besar eksil menolak tawaran menteri Yusril. Mereka menilai tawaran tersebut berangkat dari cara pandang yang keliru. Mereka merasa diposisikan seperti para migran ilegal. Bagi mereka, pemerintah pertama-tama harus menjelaskan akar persoalannya terlebih dulu, yaitu pengakuan bahwa pada masa lalu kebijakan mereka salah sehingga menyebabkan warga negaranya terasing di luar negeri. Tanpa penjelasan seperti ini tawaran pemerintah dianggap retorika belaka dan tidak mempunyai jaminan sama sekali jika mereka pulang ke Indonesia.

Secara umum, di tengah munculnya wacana tanding di seputar isu 1965-1966, posisi kaum eksil tetap terlupakan. Keberadaan mereka yang jauh dari tanah airnya membuat suara mereka kurang terdengar. Selain Gus Dur yang pernah menyebut mereka sebagai kaum ‘kelayapan’, hampir tidak ada tokoh nasional dan pejabat negara lainnya yang mewacanakan keberadaan mereka secara terbuka. Berbagai inisiatif rekonsiliasi yang dilakukan kelompok masyarakat sipil juga belum menyentuh isu mengenai mereka. Di sisi lain, pergaulan kaum eksil, seperti juga korban 1965 lainnya, umumnya terbatas. Di Belanda sendiri, kelompok-kelompok eksil hanya sesekali saja bertemu dan saling berkunjung. Sehar-hari mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.

Meski demikian, di tengah kesunyian suara kaum eksil, terdapat beberapa usaha untuk memperlihatkan eksistensi dan perlawanan terhadap rezim yang mengasingkan mereka. Di antara usaha tersebut adalah pendokumentasian wawancara dengan para eksil, pengarsipan buku dan dokumen, pendirian kelompok korban, serta penulisan autobiografi atau memoar. Usaha-

usaha ini semakin mantap setelah meluasnya penggunaan internet yang membuat makna jarak menjadi relatif. Akses orang eksil terhadap Indonesia, begitu juga sebaliknya, menjadi lebih terbuka dan interaktif.

Pendokumentasian wawancara dilakukan oleh Hersri Setiawan. Pernah aktif di LEKRA, pada awal 1960-an Hersri adalah wakil Indonesia untuk organisasi pengarang Asia-Afrika yang berbasis di Kolombo, Srilangka. Pada 1965 dia pulang ke Indonesia dan segera ditangkap oleh tentara. Antara 1969-1978 dia menjadi tahanan politik di Pulau Buru. Pada 1987 dia pindah mengikuti keluarganya ke Belanda hingga 2000. Sewaktu tinggal di Belanda inilah dia bertemu dengan para eksil di negara-negara Eropa, bahkan hingga ke Cina. Disponsori sebagian oleh IISH (International Institute of Social History) Amsterdam, dia memulai proyek bernama ‘*In Search of Silenced Voices*’ (Dragojlovic, 2002: 167-170). Proyek ini berisi rekaman wawancara dengan para eksil dan pengarsipan dokumen-dokumen pribadi mereka. Sebagian besar material hasil proyek ini sekarang tersedia untuk publik di perpustakaan IISH Amsterdam.

Salah satu koleksi ‘*In Search of Silenced Voices*’ berisi rekaman wawancara Hersri Setiawan dan Asahan Alham Aidit.⁵ Asahan bercerita pengalaman hidupnya. Selepas mengakhiri studi sastra Rusia di Universitas Indonesia, Jakarta, dia mendapat tawaran untuk melanjutkan studi pascasarjana ke Moskow dalam bidang serupa. Persis pada 1966 studinya di Moskow selesai, tetapi pada saat yang sama pula dia mengawali suatu periode yang panjang sebagai eksil. Selain terhalang pulang karena pilihan politik pribadinya, juga fakta bahwa dirinya adalah adik D. N. Aidit sebagai pemimpin PKI, dia merasa kehilangan kepercayaan diri pada banyak hal, termasuk kepada orang-orang terdekat yang sebelumnya dia kagumi. Merasa tidak cocok lagi dengan suasana Moskow, dia kemudian pindah ke Cina dan akhirnya ke Vietnam. Di Vietnam dia melanjutkan studi dan memperoleh gelar doktor dalam bidang sastra perbandingan. Akan tetapi, setelah menikah dengan perempuan Vietnam dan menetap sekian lama di sana, Alham memutuskan untuk bermigrasi ke Belanda. Dia merasa era komunisme telah senja, tidak hanya dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan ‘kapitalis’,

⁵Kode panggil: BG GC5/424

tetapi juga terutama dibuat keropos oleh para pendukungnya sendiri. Pandangan Alham yang memperlihatkan paradoks ini mewakili pandangan eksil lainnya. Suara mereka tersimpan dengan baik di perpustakaan IISH, Amsterdam.

Suara eksil diwujudkan juga dalam bentuk lain. Sarmadji membangun perpustakaan Perhimpunan Dokumentasi Indonesia (Perdoi) yang berlokasi di rumahnya di pinggiran Amsterdam (Dragojlovic, 2002: 166-167). Dia mengumpulkan bahan-bahan terkait dengan sejarah Indonesia dan khususnya lagi terkait dengan peristiwa 1965-1966. Sebagian besar bahan-bahan merupakan koleksi pribadinya dan sumbangan rekan-rekannya sesama eksil. Perdoi juga menyimpan obituari dan catatan tentang eksil yang telah meninggal. Untuk mengelola Perdoi dia dibantu beberapa temannya sesama eksil dan beberapa orang generasi keduanya (anak eksil). Status Perdoi adalah yayasan berbadan hukum.

Sarmadji mengatakan bahwa usahanya membangun dan mengelola Perdoi bukan sekadar hobi belaka. Lebih dari itu, Perdoi dibangun sebagai monumen kehilangan dan sekaligus perlawanan terhadap hegemoni Orde Baru dalam segala hal, khususnya dalam bidang sejarah. Sarmadji menilai bahwa kekuasaan Orde Baru bisa tegak selama puluhan tahun karena ditopang oleh sejarah yang dibengkokkan sedemikian rupa. Di atas ingatan kolektif yang dikuasai oleh penguasa itulah rezim fasis mendasarkan dirinya. Oleh karena itu, menurut Sarmadji, segala usaha untuk membangun ulang Indonesia harus dimulai dari pelurusan sejarah. Ini penting tidak hanya bagi korban tragedi 1965-1966 seperti dirinya tetapi terutama untuk anak-anak muda. Jumlah para korban semakin lama semakin sedikit karena satu demi satu meninggal dunia, sementara anak muda adalah pewaris sejarah yang sesungguhnya. Koleksi Perdoi pernah dipamerkan di KBRI Den Haag. Meskipun belum jelas maksud dan tujuannya, ini menandakan babak baru posisi eksil dalam pandangan negara.

Usaha lain juga dilakukan oleh Mintardjo. Rumahya di kawasan Oegstgeest, sebuah kota kecil dekat Leiden, selalu menjadi markas mahasiswa Indonesia, khususnya yang studi di Leiden. Di tempat itu Mintardjo memfasilitasi berbagai kegiatan diskusi, khususnya tentang sejarah Indonesia. Para tokoh

atau akademisi Indonesia yang sedang berkunjung ke Belanda biasanya diundang ke rumahnya untuk menceritakan situasi terkini di tanah air atau menyampaikan hasil studinya. Pada awal 2000-an bersama beberapa mahasiswa dan rekan-rekannya Mintardjo mendirikan Yayasan Sapu Lidi yang aktif mengadakan kegiatan, termasuk bekerja sama dengan KBRI dan Universitas Leiden, bertema Indonesia. Belakangan, seiring dengan semakin meluasnya penggunaan internet, Mintardjo dan para aktifis PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) memprakarsai forum 'Pondok Pak Min' di media sosial Facebook (<https://www.facebook.com/groups/412946892090403/>).

Sementara itu, Djoemaeni bersama rekan-rekannya mendirikan Lembaga Pembela Korban (LPK) 1965. Seperti organisasi-organisasi sejenis yang bermunculan di Indonesia pasca-Soeharto, lembaga ini aktif mengkampanyekan pengungkapan kebenaran dan keadilan sejarah di sekitar peristiwa 1965-1966. Kampanye kelompok ini dilakukan dengan membangun aliansi dengan sejawatnya di Indonesia dan juga melalui media internet. Salah satu kegiatan mereka adalah memberi dukungan terhadap rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang telah disahkan sebagai undang-undang oleh DPR, tetapi kemudian dibatalkan oleh MK. Sampai sekarang rencana tersebut masih berhenti di Kementerian Hukum dan HAM. Sehari-hari Djoemaeni mengelola blog (<http://lembaga-pembela-korban-1965.blogspot.com>) sebagai situs resmi LPK 1965.

Suara kaum eksil lainnya disampaikan melalui penerbitan autobiografi atau memoar. David Hill (2012: 231-232) menyebutnya sebagai sebuah resistensi kultural terhadap rezim politik maupun narasi sejarah resmi yang meminggirkan mereka. Hill mengutip pendapat Shopia A. McClennen tentang para penulis eksil keturunan Spanyol yang digambarkan "terpisah dari konteks nasional mereka; baik dalam pengertian geografis, dan dalam pengertian bagaimana mereka dihapus dari sejarah mereka", tetapi mereka "tetap terikat dengan bangsanya, dan pada saat yang sama mereka mendefinisikan diri terkait dengan komunitas-komunitas transnasional alternatif, terkonfirmasi oleh subjek marjinal".

Lebih lanjut David Hill (2012) membahas dua memoar eksil Indonesia, yaitu

karya Asahan Aidit dan Ibarruri Putri Alam. Keduanya adalah keluarga D.N. Aidit. Seperti dibahas sedikit di atas, Asahan Alham Aidit adalah adik bungsu, sementara Ibarruri adalah putrinya. Asahan Alham Aidit menulis “Cinta, Perang, dan Ilusi Antara Moskow dan Hanoi”. Dalam karya berbentuk cerita pendek memoar ini Asahan menceritakan perjalanan hidupnya dengan cukup lengkap. Berangkat ke Rusia pada awal 1960-an untuk melanjutkan studi, pada tahun 1966 dia berangkat meninggalkan Rusia menuju Vietnam. Ketika itu dia memandang Vietnam adalah negara yang masih mempertahankan prinsip revolusioner, namun akhirnya pada 1984 dia memutuskan untuk hijrah ke Belanda. Dia berkesimpulan bahwa sekarang batas antara Barat dan Timur kurang relevan lagi. Secara tajam dia bahkan mengungkap kebobrokan sistem komunisme. Menanggapi pendapat Alham ini, Pramodya Ananta Toer hanya berucap, “... ada kalanya manusia menghadapi bosan. Alham sedang dalam kondisi itu”.

Sejak berkembangnya teknologi internet, kaum eksil menemukan arena baru yang menembus batas-batas teritorial negara. Di antara eksil yang paling aktif di arena baru ini adalah Umar Said dan Ibrahim Isa. Umar Said, tinggal di Paris, Perancis, mengelola situs pribadi yang sangat aktif (<http://umarsaid.free.fr>), baru saja meninggal pada 2011 lalu. Sementara Ibrahim Isa sekarang tinggal di Amsterdam, Belanda, dan tetap aktif di berbagai diskusi dunia maya. Selain mengelola blog pribadi (<http://ibrahimisa.blogspot.com>), dia juga sangat aktif berinteraksi di media sosial Facebook (<https://www.facebook.com/ibrahim.isa3?fref=ts>). Tulisannya di dunia maya dibukukan juga dan diterbitkan di Indonesia. Pada tahun 2000 dia menerbitkan “Ibrahim Isa: Bui Tanpa Jerajak Besi” dan “Kabar dari Negeri Seberang” (Jakarta: Historia Publisher, 2012)

Kesimpulan

Dibanding korban peristiwa 1965 di dalam negeri, nasib kaum eksil Indonesia mungkin lebih baik. Mereka tidak dibunuh, dipenjara, atau dibuang ke Pulau Buru. Di negara-negara tempat mereka tinggal, mereka mendapatkan perlindungan dan penghidupan yang wajar. Ini terjadi baik ketika mereka masih tinggal di negara-negara eks-komunis maupun setelah mereka bermigrasi ke Belanda. Setelah

sebagian besar menjadi warga negara Belanda, barulah mereka memperoleh kesempatan berkunjung ke tanah kelahirannya di Indonesia.

Akan tetapi, selama proses pengasingan di luar negeri itu para eksil mengalami penderitaan berat. Mereka menanggung beban psikologis mendalam karena diputuskan dari tali ikatan keluarga, pertemanan, dan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Pencabutan status kewarganegaraan membuat hidup mereka tergantung pada belas kasihan negara lain. Di sini kita melihat adanya paradoks kewarganegaraan. Karena tergantung pada konstelasi kekuasaan di suatu negara tertentu, kewarganegaraan seringkali berhadapan secara diametral dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Meski demikian, dalam keterbatasannya para eksil Indonesia di Belanda tetap merawat komitmen nasionalisme mereka. Masing-masing dari mereka mempunyai cara tersendiri dalam mewujudkan itu. Ada yang menerbitkan biografi untuk mengoreksi narasi sejarah Indonesia yang meminggirkan keberadaan mereka, ada yang membangun perpustakaan, ada yang menyediakan rumahnya bagi kegiatan-kegiatan dan diskusi-diskusi keindonesiaan. Dari contoh-contoh yang telah dipaparkan, kita bisa melihat bahwa komitmen nasionalisme eksil Indonesia tidak terbatas oleh status kewarganegaraan mereka. Meskipun secara formal mereka sekarang berkewarganegaraan Belanda, secara politis mereka tetap menganggap dirinya orang Indonesia.

Daftar Pustaka

- Budiawan. (2004). *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto*. Jakarta: Elsam.
- Dragojlovic, A. (2002). “Materiality, loss and redemptive hope in the Indonesian leftist diaspora”, *Indonesia and Malay World*, 40 (117).
- Cribb, R. (Ed.). (1990). *The Indonesian Killings of 1965-1966*. Monash Papers on Southeast Asia, No. 21, Clayton.
- Heryanto, A. (2006). *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging*. London/New York: Routledge.
- Hill, D. (2008). “Knowing Indonesia From Afar: Indonesian Exiles and Australian

- Academics". Paper presented to the 17th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Melbourne 1-3 July 2008.
- _____. & Dragojlovic, A. (2010). "Indonesian Exiles: Crossing Cultural, Political and Religious Borders", *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 44 (1).
- Isa, I. (2010). *Bui Tanpa Jerajak Besi: Pikiran Seorang Eksil Indonesia di Luar Negeri*.
- Isa, I. (2012). *Kabar Dari Negeri Seberang*, Jakarta: Historia Publisher.
- Moestahal, A. (2002). *Dari Gontor ke Pulau Buru: Memoar H. Achmadi Moestahal*, Yogyakarta: Syarikat.
- Poesponegoro, M.D. & Notosusanto, N. (Eds.). (1993). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka [edisi empat].
- Roosa, J, Ratih, A., & Farid, H. (Eds.). (2004). *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65*. Jakarta: Elsam, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, dan Institut Sejarah Sosial Indonesia.
- Roosa, J. (2008). *Dalih Pembunuhan Masal*. Jakarta: ISSI dan Hasta Mitra.
- Roosa, J., Ratih, A. & Farid, H. (Eds.). 2004. *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65*, Jakarta: Elsam, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, dan Institut Sejarah Sosial Indonesia.
- Reid, H. (2001). *Pergulatan Muslim Komunis*, Yogyakarta: LKPSM-Syarikat.
- Sevortian, A. (2009). "Xenophobia in Post-Soviet Russia" *The Equal Rights Review*, Vol. Three, <http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/anna%20sevortian.pdf>.
- Suhelmi, A. (2006). "Communiste Debated Again: the Muslim Response to the Idea of Revoking the 1966 anti-Communism in post-Soeharto Indonesia", *Studia Islamika*, 13 (1).
- van Oorschot, W. (2006). "The Dutch Welfare State: Recent Trends and Challenges in Historical Perspective", *European Journal of Social Security*, 8 (1), <http://spitswww.uvt.nl/~worschot/wvo/ArtikelenOnline/DutchWSejss.pdf--2> Oktober 2013.

Wawancara

Djoemaeni Kartaprawira, 12 Mei 2013, di Den Haag.

S. Mintardjo, 10 Mei 2013, di Leiden.

Ibrahim Isa, 15 Mei 2013, di Amsterdam.

Sulardjo, 15 Mei 2013, di Amsterdam.

Chalik Hamid, 15 Mei 2013, di Amsterdam.

Sarmadji, 19 Mei 2013, di Amsterdam.

Siswa Santoso, 16 Mei 2013, di Amsterdam

Online

<http://www.thejakartapost.com/news/2010/03/30/mintardjo-indonesian-heart.html>

<http://www.thejakartapost.com/news/2006/04/26/recordkeeper-exiled-and-forgotten.html>

<http://news.detik.com/bandung/read/2010/08/03/161356/1412852/486/sekitar-1500-eksil-tragedi-1965-tak-bisa-pulang-ke-indonesia>

<http://www.thejakartapost.com/news/2010/07/02/ri-tries-win-hearts-its-exiles-russia.html>